

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Diskursus tentang pembangunan (*development*)¹ menjadi salah satu persoalan yang banyak dikaji pada dua dekade terakhir. Pembangunan sering kali diklaim sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan dunianya.² Ada pun konsep pembangunan yang diyakini hanya terarah pada prinsip yang menjadi konsensus sebuah komunitas politik, yakni upaya mencapai kesejahteraan umum (*common good*). Hal tersebut berarti konsep pembangunan sesungguhnya harus menunjang harkat (*preis*) dan martabat (*wurde*) manusia secara universal.³ Pembangunan harus mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama sebab indikator yang valid untuk menggambarkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai tujuan komunitas politik adalah pembangunan.⁴

Pembangunan menurut Mansour Fakih (2009), dalam bukunya *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* membahasakan bahwa pembangunan telah menjadi semacam “agama baru” yang menjanjikan harapan baru untuk memecahkan masalah-masalah sosial.⁵ Hal ini sangat jelas bahwa semua negara termasuk negara-negara yang sedang berkembang berlomba-lomba dan mengejar kemajuan untuk membangun negara-negara mereka demi terwujudnya kesejahteraan umum (*common good*).⁶

Kajian tentang pembangunan sebagai upaya untuk mengubah kondisi sosial masyarakat memuat persoalan bagaimana menciptakan keadaan yang sudah ada menjadi keadaan yang

¹ Pembangunan mengacu pada proses menuju perkembangan atau berkembang ke arah yang lebih baik secara ekonomi, politik sosial dan budaya. perkembangan berhubungan dengan pertumbuhan sosial ekonomi sesuai dengan aspek-aspek pengukuran yang digunakan di dalamnya. Secara sederhana pembangunan dalam pembahasan ini mengacu pada sebuah proses politik penyusunan kebijakan dalam publik (*public policy*) yang mengacu pada kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan sesungguhnya berkaitan dengan banyak isu seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, akses sosial ke dalam jaringan kebijakan publik, politik pendidikan yang tidak adil, kemerdekaan gender dan isu-isu sentral lainnya. Max Regus “Membongkar Aib Pembangunan” dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo (eds). *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 369.

² Bernardus Badj “Relavanasi Etika Politik Peter L. Berger Bagi Pembangunan Pariwisata di Indonesia”, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Teologi*, Vol. 15, No. 2 (Unwira Kupang: Oktober 2024), hlm. 194. <https://journal.unwira.ac.id/index.php/LUMENVERITATIS>.

³ *Ibid.*

⁴ M. Sastraprateja et al. (eds.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. x.

⁵ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Penerbit Insist Press, 2009), hlm. 11

⁶ Sirilus Stefanus Bau “Etika Politik Pembangunan Menurut Peter L. Berger. (Skripsi Sarjana, IFTK Ledalero, Maumere, 2022), hlm 1-2.

lebih baik. Dewasa ini pembangunan yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang didambakan. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.⁷ Soedjatmoko dalam lokakarya mengenai pembangunan menegaskan bahwa:

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pembangunan yang dijalankan di Dunia Ketiga selama beberapa dasawarsa terakhir yang sebagian besarnya menerapkan model-model yang disodorkan dari barat mendapat banyak kritik, yang mengharuskan suatu pemikiran ulang yang sungguh-sungguh menyeluruh, mulai dari yang bercorak reformatif hingga ke yang berwatak radikal.⁸

Pernyataan di atas, menekankan bahwa pembangunan telah dipengaruhi oleh suatu pergeseran paradigma, di mana konsep orang tentang pembangunan sudah dipengaruhi oleh pengetahuan yang bersifat subjektif, dalam artian ini pembangunan telah diideologikan. Pembangunan dipakai untuk menipu orang demi kepentingan si pembuat/penganut ideologi pembangunan tersebut sebab, term pembangunan itu amat positif, tetapi dalam praktik tujuan pembangunan itu dibelokkan arahnya oleh orang-orang yang berkuasa, bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan diri sendiri.

Akibatnya pembangunan menghadirkan “notasi” kepedihan untuk sebagian warga dunia. Pembangunan bagaikan danau air mata penderitaan dari para “korban”.⁹ Pembangunan menciptakan pelbagai macam rentetan kegagalan yang bercorak dehumanis. Misalnya penderitaan, kelaparan, kemiskinan, eksploitasi, marginalisasi, dan ketidakadilan menjadi sederet cerita sedih yang belum keluar dari dunia ini.

Tema pembangunan sebagai pembebasan manusia dari penderitaan hendak menempatkan etika sebagai dasar dari politik pembangunan. Dengan pendasaran seperti ini, semua kebijakan, konsep, dan strategi pembangunan akan dinilai secara etis apakah dia sanggup meniadakan atau membebaskan manusia dari penderitaan atau tidak. Maka menurut pendekatan ini, pembangunan merupakan usaha pembebasan manusia dari penderitaan.¹⁰

Filosofi di atas ‘serupa’ dengan pemikiran Peter L. Berger yang menegaskan bahwa pembangunan mesti memperhitungkan biaya-biaya manusia yaitu *Pertama*, “perhitungan

⁷ Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*, penerj. A. Rahman Toleng (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004), hlm. vi.

⁸ Soedjatmoko, *Pembangunan Berkelanjutan Mencari Format Politik*, ed. Yayasan SPES (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. ix.

⁹ Max Regus “Membongkar Aib Pembangunan” dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo (ed)., *Lo.cit.*

¹⁰ Benny Denar, *Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2015), hlm. 79.

penderitaan” (*calculus of pains*). Perhitungan penderitaan yang dimaksudkan oleh Berger merujuk pada berbagai penderitaan fisik yang kerap muncul akibat pembangunan seperti: kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan. Kedua “perhitungan makna” (*calculus of meaning*). Perhitungan makna yang dimaksudkan Berger merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan dan peradaban yang mereka miliki.¹¹

Bertolak dari masalah di atas, konsep politik pembangunan diperkuat dalam terang Ajaran Sosial Gereja Katolik tentang masalah ‘pembangunan atau perkembangan bangsa-bangsa’ yang turut menjadi fokus perutusan Gereja. Pembangunan sebagai proses evolusi masyarakat yang terencana dibahas dan dibicarakan hampir di dalam seluruh Ajaran Sosial Gereja. Namun demikian, tema tersebut baru mendapat kajian yang lebih spesifik pada Ensiklik *Populorum Progressio* (1967) oleh Paus Paulus VI. Ensiklik tersebut menegaskan posisi etika Kristiani terhadap agenda pembangunan yang digalakkan oleh bangsa-bangsa dunia pasca Perang Dunia II baik melalui strategi-strategi internal-nasional maupun melalui kerja sama global.¹²

Dalam cahaya Injil, Gereja menetapkan petunjuk-petunjuk etis dan kultural perihal pembangunan sebagai upaya membebaskan penderitaan manusia seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan antar umat manusia. Dua dasawarsa kemudian, masalah ‘pembangunan’ kembali menjadi fokus ‘kepemimpinan’ Paus Yohanes Paulus II dalam Ensikliknya berjudul *Sollicitudo Rei Socialis* (1987) atau ‘Keprihatinan Akan Masalah Sosial’.¹³ Bedanya, titik tolak refleksi ensiklik ini adalah hasil-hasil faktual yang telah dicapai agenda developmentalisme yang telah dijalankan oleh berbagai negara dunia. Menurut penelitian ensiklik ini, imbas dari agenda pembangunan bangsa-bangsa telah menghasilkan banyak problem kemanusiaan yang pelik. Pada kenyataannya, optimisme akan pengentasan kemiskinan justru bertolak belakang (SRS 12).¹⁴

¹¹ Bernardus Badj., *op.cit.*, hlm. 194-195.

¹²“Developmentalisme” mulai muncul dalam agenda pembangunan yang digalakkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui kerjasama global untuk mengatasi keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga. Program ini dimulai pada tahun 1960 atas pengaruh besar negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Beberapa kesepakatan global yang memuat agenda developmentalisme adalah *International Development Association* (1960), *Development Assistance Committee* (1961), hingga pembentukan *United Nations Development Program* (1965). Negara-negara maju berperan sebagai penyalur bantuan bagi negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Bdk. B. C. Smith, *Understanding Third World Politics* (London: Mac Millan Press Ltd., 1996), hlm. 61-62.

¹³ Gagasan dari ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dikutip dari sumber aslinya Paus Yohanes Paulus II, *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis (Keprihatinan Akan Masalah Sosial)*, Petrus Turang (penterj.), (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1988), hlm. 4-5.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8

Banyak negara dunia ketiga justru mengalami ketidakcukupan pangan (SRS 15). Di samping itu, persoalan pertentangan ideologi politik pembangunan (kapitalisme liberal dan komunisme marxistis) tidak saja mengacaukan perdamaian dunia dan menciptakan ketegangan politik di mana-mana, melainkan telah mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi (SRS 20, 22 dan 23). Keprihatinan lain adalah degradasi ekologis yang amat parah di berbagai belahan dunia. Keterbelakangan dan krisis ekologi disebabkan oleh apa yang distilahkan ensiklik sebagai “struktur-struktur dosa”, antara lain kehausan akan kekuasaan, perilaku konsumeristis dan eksploitasi energi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan alam (SRS 37).¹⁵

Cita-cita Gereja akan pembangunan bangsa-bangsa adalah suatu pembangunan yang sungguh-sungguh manusiawi. Pembangunan akan ekonomis belaka menurut Paus akan melahirkan jurang lebar antara yang kaya dan yang miskin.¹⁶ Pemahaman yang benar mengenai manusia akan melahirkan pembangunan manusiawi yang seutuhnya. Manusia sebagai mana ia diciptakan oleh Tuhan, adalah makhluk yang sungguh-sungguh bebas, mempunyai hak-hak asasi yang sama, dan mempunyai tugas yang sama yakni membangun dunia menjadi lebih manusiawi. Karena itu pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa harus berorientasi pada manusia itu sendiri.

Pelbagai kontroversi penerapan strategi pembangunan menciptakan rentetan kegagalan yang bercorak dehumanis. Oleh karena itu, bagaimanakah Gereja dapat sampai pada pandangan yang menyeluruh tentang pembangunan bangsa manusia selaras dengan spirit ajaran sosialnya yang mewajibkan keberpihakan pada kaum miskin (*option for the poor*)? Bagaimana Gereja merumuskan peran, kebijakan, dan prioritas sikapnya berdasarkan konsep etis pembangunan yang universal dan sesuai ajaran iman? Dan sejauh mana pandangan Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* mengenai pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan ini melatarbelakangi proyek penulisan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan mengambil tema pembangunan dan ajaran Gereja dengan judul **“PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNIA DALAM TERANG ENSIKLIK *SOLLICITUDO REI SOCIALIS* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI INDONESIA”**.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang hendak dikaji dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana pembangunan manusia seutuhnya dilihat, dievaluasi atau dinilai dalam terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan apa implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia? Masalah pokok itu akan dijabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana realitas pembangunan di Indonesia?
2. Apa itu Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*?
3. Apa implikasinya bagi pembangunan di Indonesia?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, karya ilmiah ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal. *Pertama*, menjelaskan realitas pembangunan di Indonesia. *Kedua*, menjelaskan isi ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*. *Ketiga*, menganalisis realitas pembangunan manusia seutuhnya dari perspektif ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia.

1.3.2. Manfaat

Manfaat penulisan karya ilmiah ini yaitu; *Pertama*, karya ilmiah ini ditulis untuk melengkapi sebagian persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana dalam program filsafat agama katolik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Kedua, karya ilmiah ini ditulis untuk meningkatkan, mempertajam, dan mengasah kemampuan ilmiah penulis tentang bagaimana pembangunan manusia seutuhnya dilihat, dievaluasi atau dinilai dalam terang Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia.

Ketiga, bagi pemerintah, agar lebih bijak dan rasional serta lebih memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam menyusun, membuat dan merumuskan konsep dalam pembangunan yang berwajah manusiawi.

Keempat, bagi masyarakat, agar mampu memposisikan diri dan bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Kelima, bagi akademisi, pemerhati sosial, peneliti dan pelajar, agar mampu mengembangkan ide, gagasan dan konsep pembangunan yang berwajah manusiawi sebagaimana yang telah dimulai oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*.

1.4. METODOLOGI PENULISAN

Dalam proses penyelesaian tulisan ilmiah ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode kajian kepustakaan. Dalam metode ini, penulis berusaha untuk mencari dan meramu berbagai buku, literatur-literatur serta artikel-artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan judul atau tema yang didalami oleh penulis. Selain itu, penulis juga memakai berbagai sumber lain yang mutakhir yang digunakan saat ini yakni internet. Sumber ini digunakan oleh penulis untuk mengakses berbagai hal-hal aktual yang berkaitan dengan tema dari tulisan ilmiah ini.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab akan menguraikan tema yang membentuk satu kesatuan dari keseluruhan tulisan ini. Bab I, *Pendahuluan*. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, *Yohanes Pulus II dan Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis*. Bagian ini meliputi penjelasan tentang riwayat hidup Yohanes Pulus II, karya-karya, dan Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*. Bab III, *Realitas pembangunan di Indonesia*. Pada bagian ini juga dijelaskan diskursus seputar pembangunan, dan realitas pembangunan di Indonesia.

Bab IV, *Hasil dan pembahasan*: ajaran Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dan implikasinya terhadap pembangunan di Indonesia. Bab V: merupakan bagaian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.